

**ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMBUATAN OBJEK  
PAJAK BARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA  
SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**



Disusun Oleh :  
Kezia Maharani Edwin  
NIM.49402000023

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMBUATAN OBJEK  
PAJAK BARU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA  
SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

iii

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kezia Maharani Edwin  
NIM : 49402000023  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:  
“ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMBUATAN OBJEK PAJAK BARU  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG” merupakan  
hasil karya saya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini,  
maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-  
benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 25 Januari 2023

Yang Menyatakan,

  
Kezia Maharani Edwin

NIM.49402000023

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Kezia Maharani Edwin

NIM : 49402000023

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru  
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Semarang, 25 Januari 2023

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Dr. Sri Anik.,SE., M.Si., Akt  
NIK. 210493033

**HALAMAN PENGESAHAN**

v

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas Akhir diajukan oleh:

Nama : Kezia Maharani Edwin  
NIM : 49402000023  
Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2.

  
Rustam Hnafi, SE, MSc, Akt, CA  
NIK.0612027401

Semarang, 23 Februari 2023  
Penguji 1

  
Dr. Sri Anik, SE, MSi, Akt  
NIK. 210493033

Mengetahui,  
Ketua Prodi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA  
20-2-23  
  
Ahmad Rudi Yulianto, SE, M.Si.  
NIK. 211415028



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tanpa adanya hambatan apapun. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang senantiasa kita tunggu *syafa'atnya* di *yaumul qiyamah* kelak.

Penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang” disusun untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya, program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu, memberi bimbingan, arahan, maupun dorongan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini, rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Sri Anik.,SE., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Khoirul Fuad, SE, M.Si. selaku Dosen Wali.
5. Bapak Benny selaku staff pajak bumi dan bangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang serta Penanggung Jawab Magang yang telah banyak membantu, memberikan informasi dan pengarahan bagi penulis.
6. Para Staff dan Karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, selaku pendamping magang 2022 yang telah banyak membantu dan telah sabar membimbing penulis saat kegiatan magang.
7. Orang tua kandung penulis yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil.
8. Teman-teman satu angkatan yang telah berbagi suka dan duka selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan lebih lanjut. Besar harapan penulis bahwa hasil Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Semarang, 25 Januari 2023

Penulis,



Kezia Maharan Edwin



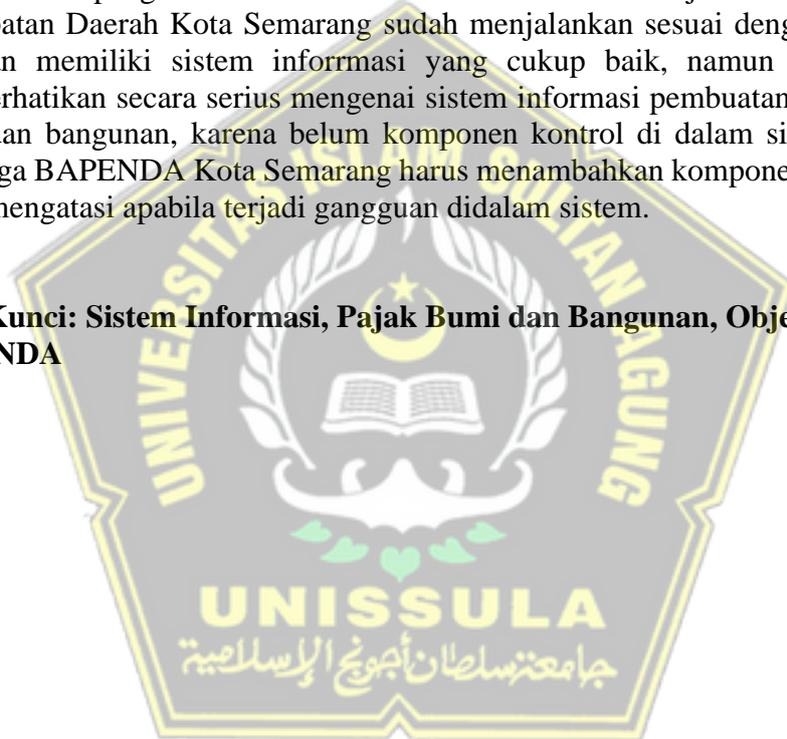
## ABSTRAK

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Pembuatan Objek Pajak Baru merupakan pelayanan pembuatan produk pajak bumi dan bangunan yang diajukan wajib pajak apabila belum memiliki objek pajak atas bumi dan bangunan, apabila sistem informasi diterapkan dengan baik, maka instansi dapat melayani kebutuhan wajib pajak dengan baik.

Penelitian dalam Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pengamatan secara langsung, dan melakukan wawancara dengan pihak instansi terkait di BAPENDA Kota Semarang..

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sudah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada dan memiliki sistem informasi yang cukup baik, namun masih belum memperhatikan secara serius mengenai sistem informasi pembuatan produk pajak bumi dan bangunan, karena belum komponen kontrol di dalam sistem tersebut. Sehingga BAPENDA Kota Semarang harus menambahkan komponen kontrol agar dapat mengatasi apabila terjadi gangguan didalam sistem.

**Kata Kunci: Sistem Informasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak, BAPENDA**



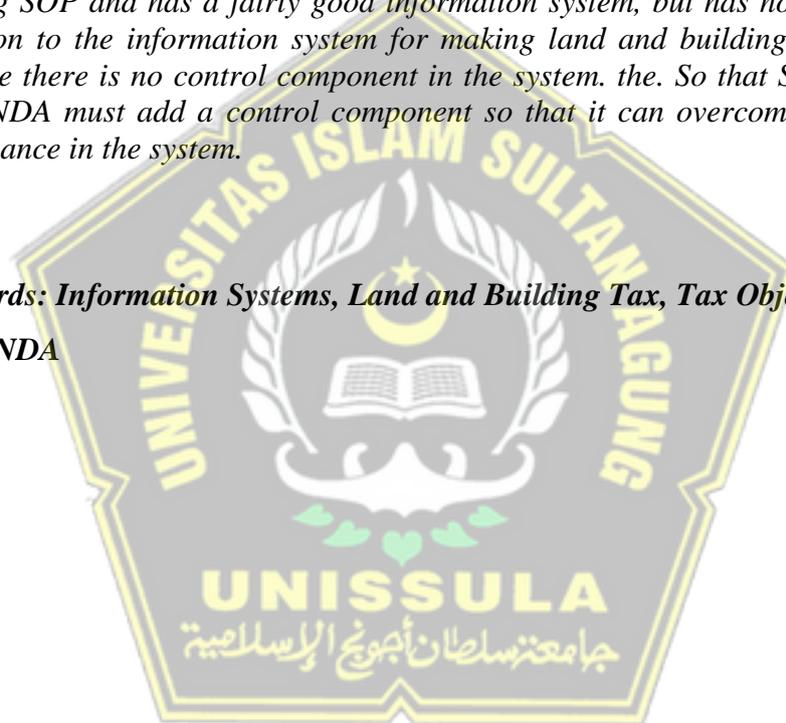
## ABSTRACT

*This final project aims to describe the implementation of the Information System for Making New Tax Objects at the Regional Revenue Agency of Semarang City. Creating a New Tax Object is a service for making land and building tax products that are submitted by taxpayers if they do not yet have a tax object on land and buildings, if the information system is implemented properly, then agencies can serve the needs of taxpayers well.*

*The research in this final project uses a descriptive approach with primary data and secondary data as the data source. The data was obtained from carrying out documentation activities, direct observation, and conducting interviews with relevant agencies at the Semarang City Bapenda.*

*. The results of the observations and interviews show that the Regional Revenue Agency for the City of Semarang has carried out in accordance with the existing SOP and has a fairly good information system, but has not paid serious attention to the information system for making land and building tax products, because there is no control component in the system. the. So that Semarang City BAPENDA must add a control component so that it can overcome if there is a disturbance in the system.*

**Keywords: Information Systems, Land and Building Tax, Tax Objects, BAPENDA**

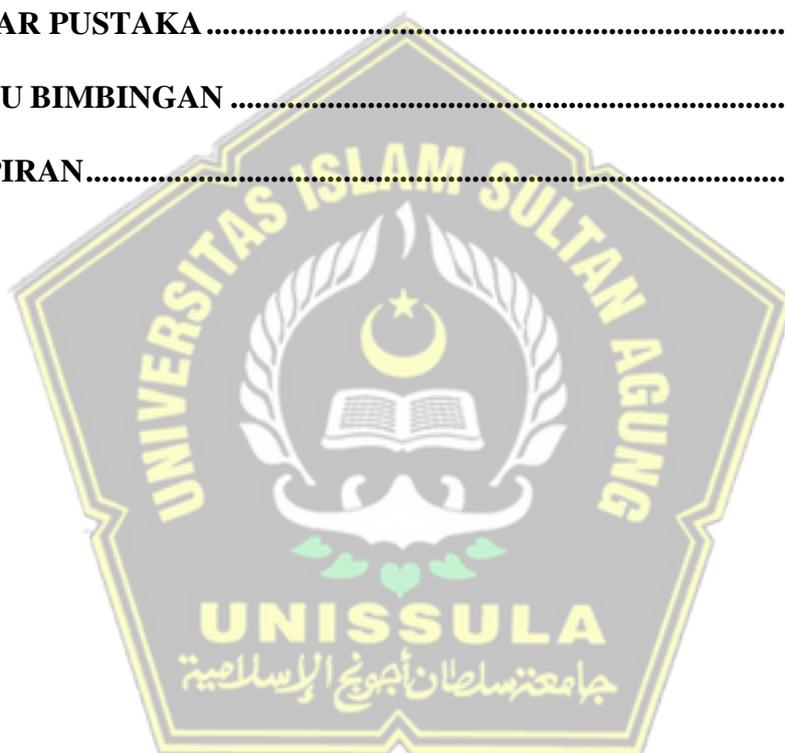


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1 Pengertian Sistem Informasi.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.2 Fungsi Sistem Informasi.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.3 Komponen Sistem Informasi (SI).....</b>	<b>7</b>
<b>2.1.4 Sistem Informasi Pelayanan Publik.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.6 Objek Pajak Bumi dan Bangunan.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>10</b>
<b>METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>10</b>

3.2	Objek Penelitian .....	10
3.3	Sumber Data .....	10
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	11
3.5	Metode Analisis Data .....	12
BAB IV .....		14
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan .....	14
4.1.2	Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang .....	16
1.	Kepala Badan .....	16
2.	Sekretariat .....	16
3.	Bidang Pajak Daerah I .....	19
4.	Bidang Pajak Daerah II .....	20
5.	Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak .....	21
6.	Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah .....	22
7.	Kelompok Jabatan Fungsional .....	24
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang .....		25
4.2.	Hasil Pengamatan .....	25
4.2.2.	Dokumen yang Digunakan dalam Pembuatan Objek Pajak Baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang .....	27
4.3.	Pembahasan .....	29
4.3.2	Pelaksanaan Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru di Badan Pendapatan Derah Kota Semarang .....	30
4.3.3	Analisis Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang .....	38

<b>4.3.4</b>	<b>Faktor yang Menghambat dalam Proses Sistem Informasi</b>	
	<b>PembuatanObjek Pajak Baru.....</b>	<b>39</b>
<b>4.3.5</b>	<b>Solusi.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V.....</b>		<b>41</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>41</b>
<b>5.2</b>	<b>Keterbatasan.....</b>	<b>42</b>
<b>5.3</b>	<b>Saran .....</b>	<b>42</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>44</b>
<b>KARTU BIMBINGAN .....</b>		<b>45</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>46</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang  
 .....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 2 Tampilan Link E-Sumpah .....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 3 Tampilan Pelayanan PBB 1.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 4 Tampilan Form Pendaftaran E-Sumpah..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 5 Tampilan Klik Daftar pada E-Sumpah..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 6 Tampilan Pembuatan Objek Baru ...**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 7 Tampilan Persyaratan Objek Pajak .**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 8 Tampilan Persyaratan Pembuatan Objek Pajak Baru..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 9 Tampilan Input Identitas .....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 10 Tampilan Input Letak Objek Pajak Baru..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 11 Tampilan Input Informasi Bangunan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 12 Tampilan Input Unggah Foto Tanah ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 13 Tampilan Daftar Pengajuan.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 14 Tampilan Pernyataan Keaslian Dokumen Data yang Diunggah  
 .....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.1 15 Tampilan Layanan Diproses.....**Error! Bookmark not defined.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Cara negara menjamin kesejahteraan warganya menunjukkan keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai pembangunan nasional. Konstitusi mengatakan bahwa kepentingan umum adalah tanggung jawab pemerintah termasuk pendidikan dan melindungi seluruh negara.. Tentu saja, pembangunan ini membutuhkan dana yang besar untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu agar kesejahteraan bangsa merata di semua bidang kehidupan, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dengan perkembangan ini, penerimaan dalam negeri, khususnya penerimaan pajak, menjadi salah satu sumber pendanaan.

Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sumber pajak. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak berpotensi mendatangkan banyak uang bagi dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai operasionalnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemberian otonomi kepala daerah dilaksanakan melalui kewenangan daerah dalam pemungutan pajak.

Ada dua jenis pajak yang dikelola dan diperoleh: pajak pusat dan pajak daerah. Negara bertugas mengurus dan memperoleh pajak pusat. Pajak daerah adalah pajak yang diurus dan diperoleh oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan saat ini merupakan pajak pusat, tetapi sebagian besar masuk ke daerah. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari desa dan kota ke pajak daerah dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel.

Sementara sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tetap dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak pusat. Badan Pendapatan Daerah akan memungut Pajak daerah kabupaten/kota akan menggantikan Pajak Bumi dan Bangunan. Nama pajak ini akan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik di pedesaan maupun di perkotaan selalu bertujuan untuk mewujudkan dengan baik sejumlah sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Suatu instansi pemerintahan memiliki tujuan tersendiri dalam sistem atau prosedur yang digunakan, sebagai salah satu cara tolak ukur hasil kinerja perusahaan tersebut dan sebagai salah satu hasil yang dipertanggung jawabkan dalam kelangsungan perusahaan. Sistem informasi sebagai peran penting dalam perusahaan terlebih instansi pemerintah yang diawasi langsung oleh negara, perannya yaitu sebagai penunjang bisnis operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan secara efektif dan strategis.

Perangkat lunak yang membantu pengorganisasian atau analisis data biasanya disebut sebagai sistem informasi. Tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk mengubah data yang tidak terstruktur menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Proses pengambilan keputusan suatu instansi dapat diamati dengan mentransformasikan hasil pengolahan data menjadi informasi.

Sistem Informasi pada era modern dan pandemi ini diperlukan oleh suatu perusahaan, terlebih kepada organisasi atau instansi yang ingin menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Pekerjaan yang memiliki hubungan langsung dengan akuntansi. Maka dari itu Sistem Informasi menjadi hal yang penting untuk mengolah data yang berkaitan dengan akuntansi.

Semakin pesatnya perkembangan zaman terkait dengan teknologi, peran akuntansi dalam memberikan informasi terkait dengan perkembangan zaman yang semakin pesat meningkat, termasuk bidang pemerintahan. Tujuan pemerintah dalam membuat aplikasi “Mobile Pakde Semar” sangat bermanfaat bagi bidang pelayanan dan pelaksanaan pembuatan produk, karena dengan adanya sistem informasi aplikasi “Mobile Pakde Semar”, proses penginputan data menjadi lebih teratur dan terstruktur salah satunya dalam pembuatan produk Objek Pajak Baru. Tentunya sistem informasi harus diperhatikan sedetail mungkin termasuk komponen-komponen yang ada didalamnya agar pelayanan pembuatan objek pajak baru dapat berjalan dengan lancar.

Dari latar belakang diatas, hingga pentingnya Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terkait penggunaan aplikasi PAKDE SEMAR dan website e-sumpah, maka tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru Online Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang”**. Guna menganalisis penggunaan Sistem Informasi pembuatan produk Objek Pajak Bumi dan Bangunan dengan aplikasi PAKDE SEMAR dan website e-sumpah pada BAPENDA Kota Semarang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menentukan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerepan sistem informasi pembuatan objek pajak baru pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sesuai dengan teori yang ada.
2. Faktor apa saja yang menghambat proses penerapan Sistem Informasi Pelayanan Pembuatan Objek Pajak Baru dalam penggunaan aplikasi PAKDE SEMAR dan website e-sumpah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem informasi pembuatan Objek Pajak Baru menurut teori yang ada.
2. Untuk menganalisis faktor apa yang menghambat proses penerapan sistem informasi pembuatan Objek Pajak Baru pada BAPENDA Kota Semarang dalam penggunaan aplikasi PAKDE SEMAR dan website e – sumpah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat atas penelitian yang dilakukan ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian menjadikan bertambahnya wawasan tentang analisis efisiensi sistem informasi pelayanan dengan aplikasi PAKDE SEMAR dan website e- sumpah yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, sebagai pengalaman baru dan informasi baru bagi pembaca menegnasi pembuatan Objek Pajak Baru Online.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan laporan ini adalah untuk meneliti bagaimana sistem informasi pembuatan Objek Pajak Baru Online ini sesuai dengan standar efisiensi.

### 3. Kegunaan Teoritis

Sebagai Ilmu Pengetahuan yang berlatarkan penelitian, berfungsi untuk menguji apakah penelitian mendukung atau menantang teori asli, Anda perlu melihatnya dengan cermat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gambaran Umum Efisiensi Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru Online**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem Informasi**

Sistem, sebagaimana didefinisikan oleh Anggraeni Yunaeti Elisabet, Irvani Rita (2017), adalah sekelompok individu yang bekerja sesuai dengan memberikan aturan-aturan yang teratur dan sistematis untuk menciptakan suatu kesatuan yang utuh mencapai tujuan. Komponen, batasan, lingkungan eksternal, antarmuka, input dan output, pemrosesan, dan tujuan sistem hanyalah beberapa karakteristik atau properti sistem.

Sebaliknya, informasi adalah data yang telah diproses untuk mengurangi ketidakpastian saat membuat keputusan tentang suatu situasi dan membuatnya akan berguna dan bermakna untuk yang menerima. Sistem orang yang terorganisir, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan data organisasi..

Menurut (Janry, 2012) Sistem informasi hanyalah kumpulan orang, prosedur dan sumber daya untuk peralatan yang mengumpulkan data dan mengubahnya menjadi informasi dan mendistribusikannya ke seluruh organisasi.

Menurut (Tata, 2012) Sistem adalah sesuatu yang dirancang untuk menangani sesuatu yang sering terjadi atau berulang kali. Filosofi atau persepsi struktur yang paling baik mengkoordinasikan aktivitas dan operasi organisasi dikenal sebagai pendapatan sistem

Menurut (Tata, 2012) Data yang telah dikategorikan, diproses, atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan disebut informasi. Data akan diubah oleh sistem informasi menjadi informasi atau bentuk yang berguna bagi yang menerimanya.

### **2.1.2 Fungsi Sistem Informasi**

Adapun fungsi dari sistem informasi menurut (Anggraeni Yunaeti Elisabet, Irvani Rita, 2017) sebagai berikut:

- a.) Untuk membuat data yang ada lebih mudah dan cepat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan sistem informasi.
- b.) Meningkatkan pengembangan aplikasi dan produktivitas pemeliharaan sistem.
- c.) Memastikan bahwa sistem informasi digunakan secara kritis dan tersedia dengan kualitas tinggi.
- d.) Menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung sistem informasi.
- e.) Mengharapkan dan mencari tahu hasil keuangan.
- f.) Memilih jumlah uang yang akan diinvestasikan dalam sistem informasi.
- g.) Membuat metode yang efisien untuk perencanaan..

### **2.1.3 Komponen Sistem Informasi (SI)**

Menurut (Anggraeni Yunaeti Elisabet, Irvani Rita, 2017) Komponen-komponen dari sistem informasi adalah sebagai berikut :

- a.) Data yang memasuki kerangka data disebut sebagai "bagian input".
- b.) Model komponen adalah kombinasi dari logika, model matematis,

dan prosedur untuk memproses data basis data dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

c.) Komponen menghasilkan data berkualitas tinggi dan dokumentasi yang berguna untuk semua pengguna sistem dan tingkat manajemen.

d.) Teknologi sistem informasi meliputi alat-alat yang digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran, dan memantau pengendalian sistem..

e.) Database komponen adalah kumpulan data terkait yang disimpan di komputer menggunakan perangkat lunak database.

f.) Komponen kontrol sistem informasi adalah komponen yang mengatur gangguan..

#### **2.1.4 Sistem Informasi Pelayanan Publik**

Menurut (Ibrahim & Idria, 2017) Sistem informasi, juga dikenal sebagai sistem informasi layanan publik, adalah kumpulan kegiatan yang mencakup penyimpanan dan pengelolaan informasi serta metode untuk mentransfer informasi dari penyelenggara kepada publik dan kembali lagi, baik secara lisan maupun elektronik.

### **2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bangunan” adalah sebagai berikut:

1. Permukaan bumi terdiri atas daratan, perairan pedalaman, dan perairan laut dalam wilayah kabupaten dan kota.
2. Struktur teknis yang ditanam atau melekat secara permanen di darat, perairan pedalaman, laut, atau keduanya disebut bangunan.

### **2.1.6 Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah. Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan termasuk dalam ayat (1) Bab 2, kecuali perkebunan, kehutanan, dan daerah pertambangan.

Bangunan teknis yang didirikan secara permanen di atas tanah atau air dikenai pajak PBB. Tanah dan/atau bangunan yang buminya dapat diartikan sebagai permukaan bumi dan badan di bawahnya dianggap bangunan..

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menghindari kesimpulan yang valid dengan menjelaskan dan menggambarkan sumber dan data yang dikumpulkan. Penelitian deskriptif, seperti yang didefinisikan oleh Sugiyono (2018), bertujuan untuk menentukan nilai suatu variabel independen, baik satu atau lebih variabel (independen) tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Penelitian deskriptif hanya mengumpulkan, menyusun, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data untuk memberikan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Sugiyono (2018) mendefinisikan istilah “objek penelitian” sebagai penelitian terhadap seseorang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Obyek dengan Analisis Efisiensi Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, serta pemanfaatan aplikasi PAKDE SEMAR dan website e-oath menjadi pokok bahasan penelitian ini.

#### **3.3 Sumber Data**

Apa pun yang dapat memberikan informasi tentang penelitian terkait adalah sumber data. Dua jenis sumber data berikut digunakan dalam penelitian ini:

## 1. Data Primer

Sugiyono (2018) menegaskan bahwa informasi esensial merupakan sumber informasi langsung bagi para pengumpul informasi. Peneliti sendiri mengumpulkan data langsung dari sumber primer atau lokasi penelitian. Sebagai data primer, digunakan tanggapan informan penelitian terhadap wawancara terhadap subjek. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan Staff bagian pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiono (2018), data sekunder adalah sumber data seperti dokumen atau individu lain yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data. Sesuai Peraturan Presiden, penelitian ini menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian sistem informasi pembuatan objek pajak baru..

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif berupa deskripsi, seperti nama satuan kerja perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi, serta visi dan misi. Memanfaatkan studi literatur untuk mengumpulkan, merekam, dan mengkaji literatur relevan yang ada dengan cara::

- a) Metode Dokumentasi, dimana subjek dan sekitarnya diamati untuk mengumpulkan informasi tentang masa lalu perusahaan, produk, dan dokumen yang diperlukan untuk Tata Cara Sistem Informasi Pembuatan

Objek Pajak Baru Secara Online.

b) Pengamatan: Cara pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati kegiatan SKPD khususnya pada Sub Bidang 1 Pajak Bumi dan Bangunan.

c) Hasil metode dokumentasi diperkuat dengan menggunakan metode wawancara, khususnya mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing komponen dan fungsi dokumen dalam Prosedur Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru Secara Online.

### 3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugyono (2018), analisis data adalah proses pengujian data dan menggunakan hasilnya sebagai bukti yang cukup untuk menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian, analisis data berfungsi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti, dan menyelesaikan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis. Penelitian deskriptif, sebagaimana didefinisikan oleh Sugiono (2018), bertujuan untuk menentukan nilai suatu variabel bebas, yang dapat berupa satu atau lebih variabel (independen), tanpa membandingkan atau mengaitkannya dengan variabel lain, seperti data dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah langkah-langkah teknik analisis yang digunakan untuk menulis laporan ini seperti yang telah dijelaskan di atas:

Mengumpulkan data dan informasi tentang sistem informasi pembuatan objek pajak baru berdasarkan hasil wawancara.

1. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang sistem

informasi pembuatan objek pajak baru.

2. Menguraikan sistem informasi dan mengkaitkannya dengan pembuatan objek pajak baru, sesuai dengan teori yang ada.
3. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil menganalisa data dan menjelaskan mengenai hasil penelitian tersebut.



## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang yang lebih sering disebut DPKAD Kota Semarang merupakan organisasi baru yang dibentuk sebagai hasil gabungan Dinas Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Semarang yang dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 1999. Hal itu dilakukan untuk maksud mewujudkan otonomi daerah dan menyelesaikan persoalan pusat dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan keuangan yang sehat..

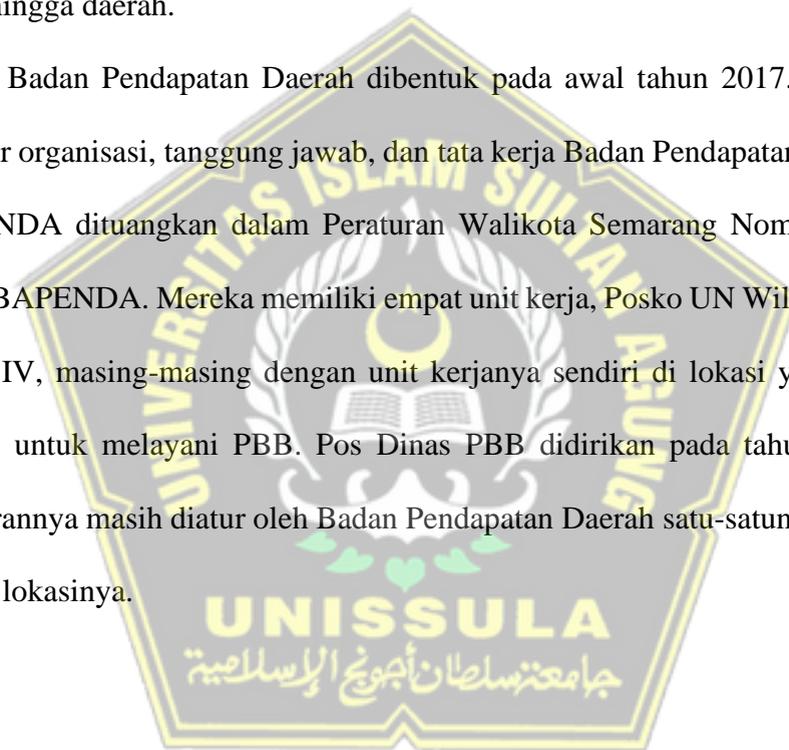
Kemudian dilanjutkan dengan SK Wali Kota Semarang Nomor yang mengatur tata cara pelaksanaannya. tanggal 25 April 2001, 061.1/188/2001. Namun DPKAD Kota Semarang harus tetap Misi organisasi ini adalah membantu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sehingga daerah dapat mengelola keuangannya secara lebih efektif dan efisien. Ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup semua orang di wilayah ini. zaman dan perubahan peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dua peran yang dimainkan oleh Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Tugas DPKAD sebagai SKPD antara lain mengawasi pengelolaan belanja gaji PNS, belanja rutin SKPD, dan belanja kegiatan SKPD,

selain mengelola aset dan pendapatan awal Kota Semarang. Penerimaan Pembiayaan Daerah, Saldo, dan biaya tidak langsung lainnya semuanya dikelola oleh DPKAD sebagai PPKD. selain DPKAD menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah.

DPKAD juga turut andil dalam penyusunan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab DPKAD, karena ada regulasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari pusat hingga daerah.

Badan Pendapatan Daerah dibentuk pada awal tahun 2017. Kedudukan, struktur organisasi, tanggung jawab, dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA dituangkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016. BAPENDA. Mereka memiliki empat unit kerja, Posko UN Wilayah I hingga Posko IV, masing-masing dengan unit kerjanya sendiri di lokasi yang berbeda, khusus untuk melayani PBB. Pos Dinas PBB didirikan pada tahun 2012, dan peraturannya masih diatur oleh Badan Pendapatan Daerah satu-satunya perbedaan adalah lokasinya.



#### 4.1.2 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Dinas Pendapatan Kota Semarang mempunyai tujuan: “Semarang Kota Besar Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Sejahtera”. Badan Pendapatan Daerah memiliki misi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

1. mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya.
2. mewujudkan pemerintahan yang lebih dapat diandalkan untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. membuat kota yang berkembang menjadi lebih baik untuk lingkungan.
4. menumbuhkan lingkungan yang ramah bisnis dan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal

#### Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

##### 1. Kepala Badan

Merencanakan, memimpin, mengarahkan, mendorong, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah adalah semua tanggung jawab pimpinan organisasi.

##### 2. Sekretariat

Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang PNBPD Daerah, dan Bidang Pembukuan dan Jasa Daerah semuanya berada di bawah kendali Sekretariat, yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyinkronkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Sekretariat melakukan tugas-tugas berikut untuk memenuhi tanggung jawabnya:

- a) Kegiatan program, anggaran, dan perencanaan;
- b) Pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan;
- c) Memberikan instruksi bawahan;
- d) Menyelesaikan tugas yang diberikan kepada staff dengan konteks tanggung jawabnya;
- e) Mempersiapkan pegawai terhadap target pekerjaannya;
- f) Evaluasi tugas kesekretariatan, Bidang Perpajakan Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Penerimaan Daerah Bukan Pajak, dan Bidang Pelayanan Pembukuan dan Penerimaan Daerah, serta koordinasi sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan perangkat daerah lainnya;
- h) Kegiatan pengambilan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan dan evaluasi;
- i) Menindaklanjuti langkah-langkah yang diambil untuk membuat Rencana Kerja Tahunan, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja;
- j) Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda;
- k) Melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi Bapenda;

- l) Melaksanakan persiapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda;
- m) Mempersiapkan bahan penyusunan Laporan Informasi Pertanggungjawaban Walikota;
- n) Menyiapkan kegiatan yang diperlukan untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Pemerintah Bapenda;
- o) kegiatan pengelolaan dan administrasi keuangan Bapenda dilakukan;
- p) Pelaksanaan administrasi gaji dan tunjangan di lingkungan Bapenda;
- q) Penyelenggaraan surat menyurat, perpustakaan, arsip, dokumentasi, protokoler, dan hubungan masyarakat Bapenda;
- r) Penyediaan layanan listrik, sumber daya air, dan komunikasi;
- s) Pelaksanaan pengaturan kenyamanan dan pesta untuk pertemuan/kumpul-kumpul, dan kunjungan pengunjung di dalam Bapenda;
- t) Penyelenggaraan pengadaan peralatan gedung kantor, pengelolaan inventaris, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- u) Penerapan manajemen persediaan dan bahan habis pakai; implementasi manajemen kepegawaian Bapenda;
- v) Pelaksanaan penyiapan dan pendistribusian data dan informasi di Bapenda;
- w) Pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan wakil dalam batas kewajibannya;

- x) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan program;
- y) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan, termasuk penyusunan laporan program dan kegiatan serta tanggung jawab lainnya..

### 3. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Perpajakan Daerah I bertugas di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Topik-topik berikut dicakup oleh tanggung jawab Perpajakan Daerah I:

- a) Kegiatan program, anggaran, dan perencanaan;
- b) Pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan;
- c) Memberikan instruksi bawahan;
- d) Melaksanakan tugas bawahan dalam konteks tanggung jawabnya;
- e) Melaksanakan kegiatan untuk menyiapkan pekerja untuk tujuan kerja mereka;
- f) Bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan instansi terkait;
- g) Bidang Perpajakan Daerah I merupakan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan;
- h) Melaksanakan Penetapan Pajak Daerah I subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I, dan Pemungutan Pajak Daerah I;
- i) melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi Pajak Daerah I;
- j) Kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah

#### Bidang Perpajakan I;

- k) Melakukan evaluasi kinerja pegawai di dalam wilayah tanggung jawabnya;
- l) Dilakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m) Pengurangan penggunaan laporan kegiatan dan program;
- n) Melaksanakan tanggung jawab kedinasan tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya;

#### **4. Bidang Pajak Daerah II**

Bidang Perpajakan Daerah II bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pendaftaran serta pendataan, penetapan, dan penagihan.

Untuk menyelesaikan kewajibannya Daerah Tugas Provinsi II memiliki kemampuan yang meliputi:

- a) Kegiatan program, anggaran, dan perencanaan;
- b) Pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan;
- c) Memberikan instruksi bawahan;
- d) Menyelesaikan tugas yang diberikan kepada bawahan dalam konteks tanggung jawabnya;
- e) Melaksanakan kegiatan untuk menyiapkan pekerja untuk tujuan kerja mereka;
- f) Bekerja sama dengan organisasi terkait dan perangkat daerah lainnya;
- g) Activities related to the implementation of local tax policy

formulation;

h) Melaksanakan tugas di Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II, Penetapan Pajak Daerah II, dan Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II;

i) kegiatan pengumpulan dan pelaksanaan pendataan Pajak Daerah II;

j) Inisiatif pengelolaan dan akuntabilitas keuangan Pajak Daerah II;

k) Melakukan evaluasi kinerja pegawai di dalam wilayah tanggung jawabnya;

l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

m) Penyusutan penggunaan laporan program dan kegiatan;

n) Melaksanakan tanggung jawab resmi tambahan yang ditugaskan kepada Anda oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawab dan tanggung jawab Anda.

### **5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak**

Sub Bidang Perimbangan, Sub Bidang PAD Lainnya, dan Sub Bidang Pendapatan Lain yang Sah merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi, dan Subsektor Administrasi Retribusi yang semuanya menjadi tanggung jawab Bidang Penerimaan Daerah Bukan Pajak. Berikut peran yang dimainkan oleh PNBPD dalam menjalankan tanggung jawabnya:

a) Kegiatan program, anggaran, dan perencanaan;

b) Pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan;

c) Memberikan instruksi bawahan;

- d) Menyelesaikan tugas yang diberikan kepada bawahan dalam batas-batas tanggung jawabnya;
- e) Pelaksanaan kegiatan untuk mempersiapkan pegawai terhadap target pekerjaannya;
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan perangkat daerah lainnya;
- g) dilakukan kegiatan perumusan kebijakan di Bidang PNBK;
- h) Kegiatan pada subsektor Perimbangan, PAD Lain dan Penerimaan Legal, dan Administrasi Retribusi dilakukan.
- i) Melakukan kegiatan pendataan tentang Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- j) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerimaan daerah bukan pajak dan akuntabilitas keuangan.
- k) Melakukan evaluasi kinerja pegawai di dalam wilayah tanggung jawabnya;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m) Penyusunan penggunaan laporan program dan kegiatan;
- n) Melaksanakan tanggung jawab kedinasan tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya;

## **6. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah**

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Sub Bidang Penyuluhan perlu berkoordinasi dan bekerja sama untuk melacak uang dan memastikan pajak dibayar tepat waktu. Sub

Bidang Sistem Informasi Penerimaan Daerah membantu melacak keuangan seluruh kelompok tersebut.:

- a) Kegiatan program, anggaran, dan perencanaan;
- b) Pelimpahan tanggung jawab kepada bawahan;
- c) Memberikan instruksi bawahan;
- d) Menyelesaikan tugas yang diberikan kepada bawahan dalam batas-batas tanggung jawabnya;
- e) Pelaksanaan kegiatan untuk mempersiapkan pegawai terhadap target pekerjaannya;
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan perangkat daerah lainnya;
- g) Pelaksanaan pelayanan pendapatan daerah dan kegiatan penyusunan kebijakan akuntansi;
- h) Berpartisipasi dalam kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan Pendapatan Daerah, dan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- i) Bekerja di bidang pembukuan dan Badan Pendapatan Daerah untuk menyusun data dan informasi;
- j) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terkait kegiatan dan pembukuan Dinas Pendapatan Daerah;
- k) Melakukan evaluasi kinerja pegawai di dalam wilayah tanggung jawabnya;
- l) Pelatihan administrasi dan pelaksanaan kesiapan informasi dan data

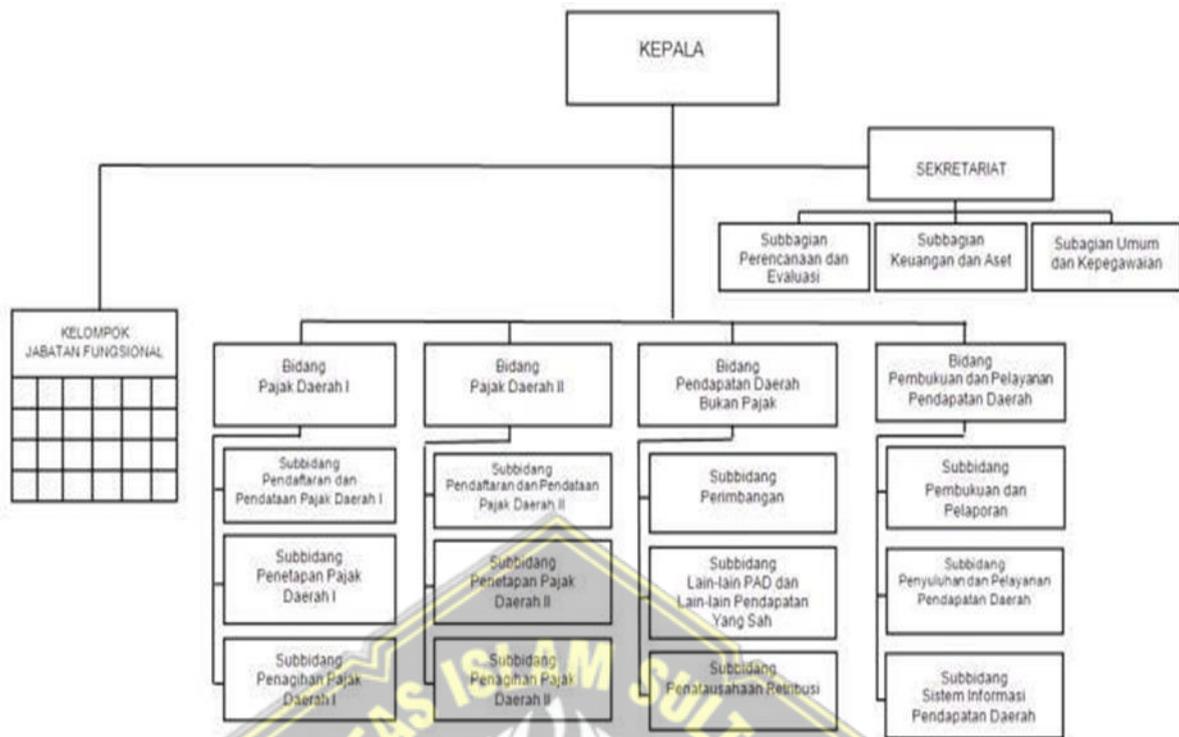
Bapenda;

- m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- n) Laporan kegiatan dan program memburuk;
- o) Tanggung jawab kedinasan lain pimpinan dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya;

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan oleh golongan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagan Organisasi BAPENDA Kota Semarang dirinci lebih rinci di bawah ini:





WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

## Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Gambar 4.1 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

### 4.2. Hasil Pengamatan

#### 4.2.1. Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Dalam melaksanakan kegiatan pembuatan objek pajak baru, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang menjadi acuan mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran objek pajak baru hingga terbitnya SPPT. Berdasarkan hasil pengamatan, alur pembuatan objek pajak baru yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

Proses Pendaftaran Objek Baru dimulai dengan mendaftar ke Pos Pelayanan PBB Daerah setempat. Setelah aplikasi selesai, Pos Layanan akan memeriksanya dan menjadwalkannya untuk diproses. Setelah aplikasi diterima, Posko Layanan akan mengirimkannya ke tim peneliti untuk verifikasi dan pembuatan konsep deskripsi penelitian. Tim peneliti kemudian akan menandatangani konsep deskripsi penelitian dan membuang file aplikasi untuk penelitian. Tim peneliti juga akan membuat dan mengirimkan konsep SPPT ke Pos Pelayanan PBB. Pos Pelayanan kemudian akan melakukan verifikasi dan paraf konsep SPPT, dan mengirimkannya ke Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian akan menerima dan menyampaikan SPPT tersebut ke Pos Pelayanan PBB.



#### **4.2.2. Dokumen yang Digunakan dalam Pembuatan Objek Pajak Baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

Ada beberapa tahap dalam pembuatan objek pajak baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang dimaksudkan untuk menjadi syarat dan ketentuan pendukung agar tidak terjadi kesalahandalam penginputan data yang masuk kedalam sistem, dokumen yang dibutuhkan dalam penginputan data pembuatan objek pajak baru yaitu:

1. FC. KTP/Kartu keluarga

Merupakan dokumen yang digunakan setiap pembuatan produk di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang untuk mengetahui identitas dari wajib pajak sebagai Warga Negara Indonesia.

2. FC. Sertifikat/ Akta Jual Beli

Surat yang menjadi bukti kuat bahwa rumah atau tanah telah dijual dan dibeli secara sah dengan harga dan syarat-syarat lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. FC. IMB/ Keterangan Bermaterai Mengenai Luas Bangunan/ Bukti Lain

Salah satu dokumen hukum yang digunakan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum adalah izin mendirikan bangunan. Sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, bangunan yang diusulkan akan mendapat persetujuan dari IMB. Selain itu, keberadaan IMB menunjukkan bahwa suatu rencana pembangunan gedung dapat memperhatikan kepentingan masyarakat.

4. Surat Keterangan Lurah

Dokumen surat keterangan lurah digunakan apabila wajib pajak tidak

memiliki surat resmi kepemilikan, maka untuk mengganti dokumen tersebut dengan menggunakan surat keterangan lurah tempat tinggal setempat.

#### 5. SPOP, LSPOP

Salah satu dokumen hukum yang digunakan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum adalah dokumen izin mendirikan bangunan. Sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, bangunan yang diusulkan akan mendapat persetujuan dari IMB. Adanya IMB juga menunjukkan bahwa rencana pembangunan gedung dapat memperhatikan kepentingan umum.

#### 6. Surat kuasa bermaterai

Surat kuasa bermeterai adalah surat yang ditandatangani sebagai penunjukan resmi mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dalam melaksanakan hak dan/atau membayar pajak.

#### 7. FC. KTP yang diberi kuasa

Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Ini juga berfungsi sebagai identitas pribadi sebagai data pendukung.

#### 8. FC. SPPT PBB tetangga kanan/ kiri

Dokumen SPPT PBB tetangga kanan/kiri digunakan sebagai acuan untuk wajib pajak untuk melihat luas bangunan dan informasi yang ada didalamnya ketika pengajuan objek pajak baru sebelum diterbitkannya

SPPT.

#### 9. Foto Lokasi Objek Pajak

Foto harta, kekayaan, dan kondisi Wajib Pajak orang pribadi dan/atau badan dapat digunakan sebagai alat informasi dan data untuk menyelidiki kemungkinan perpajakan.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1 Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru

Dalam melaksanakan kegiatan pembuatan objek pajak baru, terdapat *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang menjadi acuan mulai dari pengajuan permohonan objek pajak baru hingga terbitnya SPPT. Berikut merupakan komponen sistem informasi pembuatan objek pajak baru:

Menurut (Anggraeni Yunaeti Elisabet, Irvani Rita, 2017) Komponen-komponen dari sistem informasi adalah sebagai berikut :

- e.) Data yang memasuki kerangka data disebut sebagai "bagian input". f.) Model komponen adalah kombinasi dari logika, model matematis, dan prosedur untuk memproses data basis data dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
- g.) Komponen menghasilkan data berkualitas tinggi dan dokumentasi yang berguna untuk semua pengguna sistem dan tingkat manajemen.
- h.) Alat-alat yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, memproduksi dan mengirimkan output, dan memonitor sistem kontrol merupakan komponen teknologi sistem informasi.
- i.) Kumpulan data tertaut yang disimpan di komputer menggunakan

perangkat lunak basis data dikenal sebagai basis data komponen.

j.) Komponen kontrol adalah komponen dalam sistem informasi yang mengendalikan gangguan..

### **4.3.2 Pelaksanaan Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

Pakde Semar adalah aplikasi pajak daerah kota semarang. Dikembangkan untuk memudahkan pelacakan layanan PBB (PBB), melihat status pembayaran PBB, mencetak forum pengelolaan PBB, menghubungkan pembayaran ke bank, dan menemukan layanan pembayaran pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). pelaporan pajak daerah.

Keyword "PAKDE SEMAR" dapat diketik di Play Store untuk mendapatkan aplikasi tersebut. Wajib Pajak harus menyiapkan semua persyaratan yang diperlukan, termasuk data pada lampiran sebelumnya, sebelum mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan.

Adapun pelaksanaan sistem informasi pembuatan objek pajak baru dengan cara sebagai berikut:

a) Buka alamat Website "E – SUMPAAH

”<http://esumpah.semarangkota.go.id> (bukan “https”) pada browser

untuk masuk ke E- Sumpah



Gambar 4.1 2 Tampilan Link E-Sumpah

- b) Silahkan loginterlebih dahulu dengan mengisi NIK, Password, dan kode OTP yang dikirim ke nomor yang sudah didaftarkan. Klik daftar baru apabila anda pengguna baru.



Gambar 4.1 3 Tampilan Pelayanan PBB 1

- c) Berikut tampilan Form Pendaftaran “E – SUMPAAH” apabila sudah terdaftar lewat langkah ini. Kemudian, input identitas anda.



Gambar 4.1 4 Tampilan Form Pendaftaran E-Sumpah

- d) Berikut tampilan Form Pendaftaran “E – SUMPAAH” apabila anda sudah terdaftar lewat langkah ini. Kemudian klik “DAFTAR” untuk melanjutkan.

Gambar 4.1 5 Tampilan Klik Daftar pada E-Sumpah

- e) Ketika muncul tulisan “welcome you have signed up successfully” pendaftaran anda sudah berhasil. Lalu klik icon “+” pada pojok kanan untuk membuka jenis permohonan pelayanan.



Gambar 4.1 6 Tampilan Pembuatan Objek Baru

f) Untuk Pembuatan Objek Pajak Baru, klik “Pendaftaran Objek Baru”



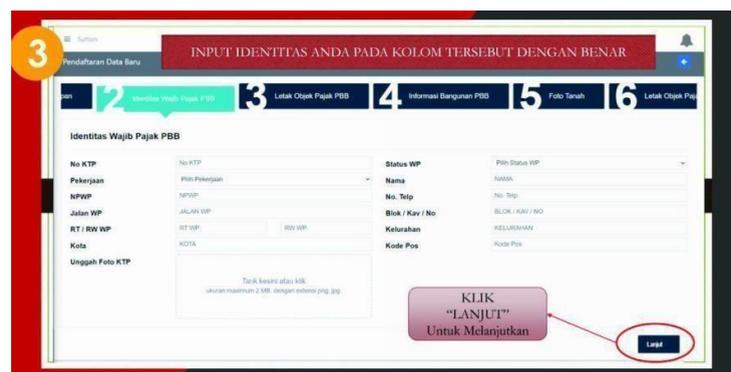
Gambar 4.1 7 Tampilan Persyaratan Objek Pajak

g) Kemudian muncul persyaratan Pembuatan Objek Pajak Baru yang harus dilengkapi untuk diupload. Kemudian klik “LANJUT” pada bagian kiri bawah.



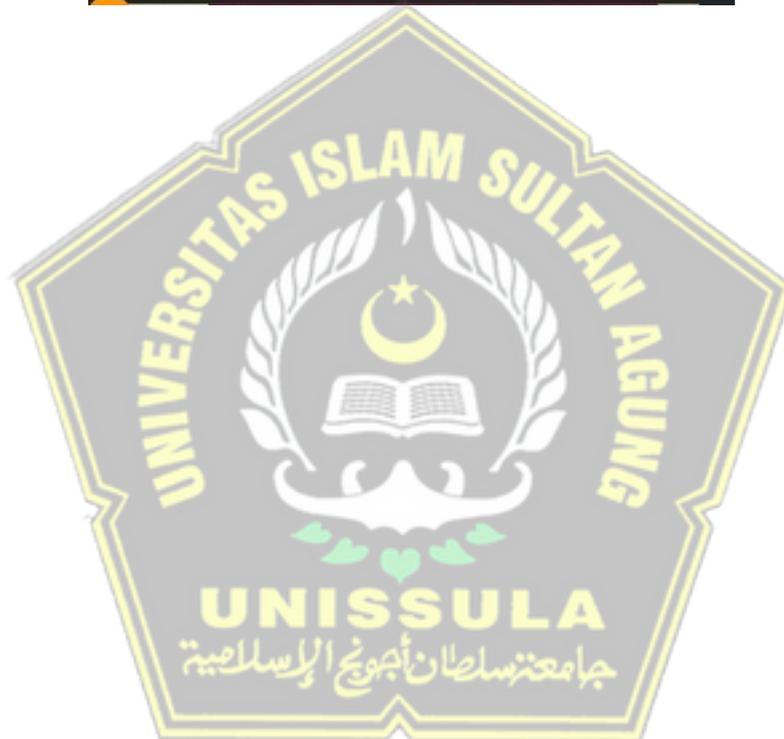
Gambar 4.1 8 Tampilan Persyaratan Pembuatan Objek Pajak Baru

h) Setelah itu input identitas anda pada kolom dengan benar. Klik “LANJUT” untuk melanjutkan.



Gambar 4.1 9 Tampilan Input Identitas

- i) Kemudian, input letak objek anda pada kolom dengan benar.  
Klik “LANJUT” untuk melanjutkan



Gambar 4.1 10 Tampilan Input Letak Objek Pajak Baru

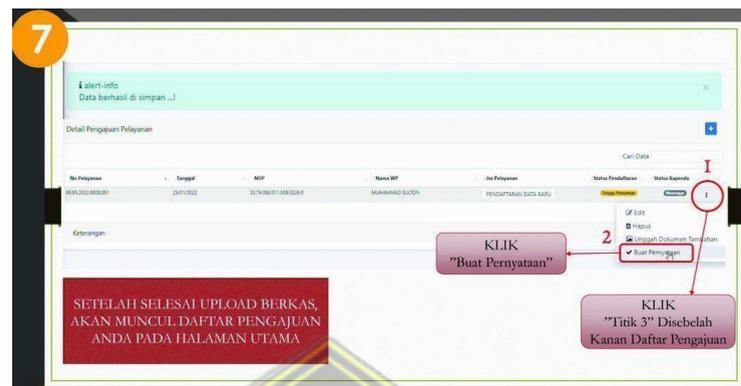
- j) Lalu, input informasi bangunan anda pada kolom seperti dibawah ini dengan benar. Klik“LANJUT” untuk melanjutkan.

Gambar 4.1 11 Tampilan Input Informasi Bangunan

- k) Step selanjutnya adalah, unggah foto tanah. Klik “LANJUT” untuk melanjutkan.

Gambar 4.1 12 Tampilan Input Unggah Foto Tanah

- l) Setelah selesai upload berkas akan muncul daftar pengajuan anda pada halaman utama. Klik “titik 3” disebelah kanan daftar pengajuan. Kemudian klik “Buat Pernyataan”



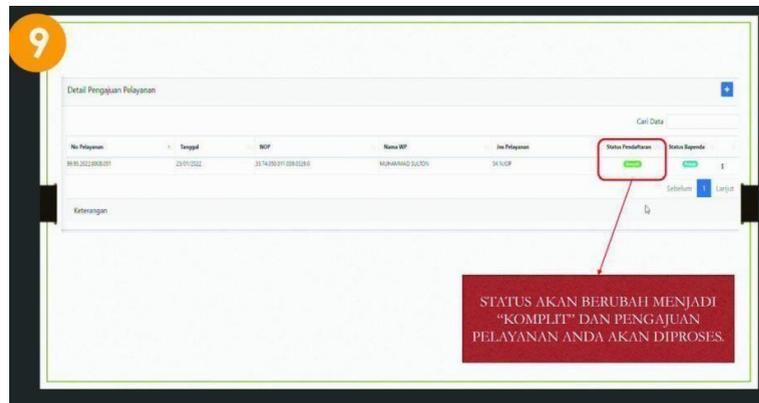
Gambar 4.13 Tampilan Daftar Pengajuan

- m) Lalu, muncul pernyataan keaslian dokumen dan data yang diunggah. Dan klik “setuju” untuk melanjutkan proses pengajuan.



Gambar 4.14 Tampilan Pernyataan Keaslian Dokumen Data yang Diunggah

- n) Setelah itu, akan muncul tampilan status akan berubah menjadi “komplit” dan pengajuan pelayanan akan diproses.



Gambar 4.1 15 Tampilan Layanan Diproses

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang selalu mencari cara baru untuk memberikan pelayanan (WP) yang lebih baik kepada wajib pajak. Yang terbaru adalah pengenalan aplikasi seluler yang dikenal sebagai Pakde Semar (Pajak Daerah Semarang). Dua belas fitur yang menyederhanakan WP disertakan dalam aplikasi baru, yang dapat diunduh dari PlayStore. Mulai dari layanan pelacakan layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendaftaran wajib pajak baru, persyaratan view, hingga piutang pajak, masih banyak lagi.

Dengan adanya aplikasi tersebut, dapat mempermudah para wajibpajak dalam pembuatan objek pajak baru. Sistem informasi tersebut berisikan pelayanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam pengajuan produk Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu produk Pajak Bumi dan Bangunan yang dibahas adalah produk pelayanan pengajuan Objek PajakBaru yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistem informasi ini dapat mempermudah dalam

pembuatan Objek Pajak Baru.

### **4.3.3 Analisis Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang**

Tujuan utama dari sistem informasi pada dasarnya adalah untuk menjaga integritas data, integritas data berarti bahwa data memiliki karakteristik sebagai berikut: Kesempurnaan, baik dan dapat diandalkan, kebersihan dan ketelitian. Kemudian sistem informasi menjaga keefektifan sistem, sistem informasi dianggap efektif hanya bila sistem dapat mencapai tujuannya. Diperlukan upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna (user) sistem (SAFIRA, 2019). Maka demikian, sistem informasi sangat penting dalam kegiatan pembuatan objek pajak baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Dibandingkan dengan sistem informasi menurut teori (Anggraeni Yunaeti Elisabet, Irvani Rita, 2017). Sistem informasi pembuatan objek pajak baru yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sudah cukup baik, akan tetapi perlu diperbaiki terkait dengan komponen-komponen yang ada didalam sistem informasi tersebut. Pada komponen sistem informasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang belum dijelaskan mengenai komponen kontrol. Sehingga hal tersebut dapat menghambat para pemakai sistem tidak mendapatkan informasi yang berkualitas dalam melakukan kegiatan pembuatan objek pajak baru ketika sistem mengalami gangguan. Adanya komponen kontrol merupakan hal yang penting dalam pembuatan objek pajak baru, karena komponen kontrol adalah komponen yang dapat mengendalikan gangguan apabila wajib pajak dalam menginput data ketika proses pembuatan objek pajak baru.

menyajikan informasi mengenai berhasil tidaknya dalam pembuatan objek pajak baru dan tidak dijelaskan mengenai informasi terbitnya SPPT. Komponen kontrol yang ada didalam sistem akan berkaitan dengan penginputan data sampai dengan kegiatan memproses data dalam sistem yang digunakan oleh wajib pajak. Dengan adanya komponen kontrol dalam sistem informasi pembuatan objek pajak baru, maka akan dapat mengatasi masalah gangguan yang terjadi dan meningkatkan kinerja bagian pelayanan dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem informasi yang berlaku, Kepala Bagian Pelayanan sebaiknya memberikan instruksi atau pemahaman kepada staff pembuatan produk pajak bumi dan bangunan untuk SOP dan komponen dari sistem informasi yang ada dengan seksama dan melaksanakan semua kegiatan pembuatan objek pajak baru sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat terlaksana dengan baik.

#### **4.3.4 Faktor yang Menghambat dalam Proses Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru**

Terdapat sejumlah faktor yang menghambat proses Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, diantaranya ialah:

1. Tidak adanya tim verifikator disetiap kantor pos pelayanan untuk mengecek kelengkapan berkas dokumen Wajib Pajak. Hal ini berdampak customer service yang berada pada pos wilayah harus melakukan pengecekan pada kantor pusat.
2. Seluruh sistem yang berjalan hanya dapat dikendalikan oleh kantor pusat.

Sehingga apabila ada masalah yang mengganggu sistem hanya bisa diatasi oleh kantor pusat dan pelayanan di pos wilayah menjadi terhambat.

3. Adanya beberapa dokumen yang kurang lengkap, dan ketidak tepatan pengumpulan dokumen. Sehingga terjadinya molornya penerbitan SPPT.
4. Sistem sulit diakses oleh masyarakat di pedesaan. Sehingga masyarakat harus datang ke kantor untuk melakukan proses pembuatan objek pajak baru.

#### **4.3.5 Solusi**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka solusi yang dapat penulis berikan untuk dijadikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu memperbaiki sistem informasi dengan menambahkan komponen kontrol agar staff bagian pelayanan pembuatan produk pajak bumi dan bangunan khususnya objek pajak baru dapat mengontrol sistem yang ada apabila terjadi gangguan.

Selanjutnya menambah sumber daya manusia agar dapat mengecek dokumen wajib pajak di pos wilayah setempat, karena untuk mengetahui dokumen tersebut lengkap atau tidak hanya bisa dilakukan untuk kantor pusat kota saja, sehingga apabila sudah berjalan dengan optimal dan ditambahkan staff verifikator di pos wilayah pelayanan pajak bumi dan bangunan setempat akan muncul sebagai acuan kerja yang baik demi meningkatkan kinerja khususnya dalam melaksanakan pembuatan objek pajak bumi dan bangunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan mengenai Analisis Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Alur prosedur pembuatan objek pajak baru yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dapat dikategorikan cukup baik, bagian pelayanan pembuatan produk pajak bumi dan bangunan memiliki prosedur tetap sebagai acuan dalam melaksanakan tanggungjawab.
2. Sistem informasi pembuatan objek pajak baru yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tidak terdapat adanya komponen kontrol, hal tersebut menyebabkan staff bagian pelayanan pembuatan produk pajak bumi dan bangunan tidak dapat mengontrol dan memeriksa sistem secara berkala apabila terjadi gangguan.
3. Dokumen yang kurang lengkap, mengharuskan untuk pengembalian ke pos wilayah masing-masing agar dilengkapi terlebih dahulu yang akan berdampak pada molornya penerbitan SPPT yang akan diserahkan kepada pos wilayah. Penyerahan SPPT di pos wilayah berguna sebagai acuan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan,
4. Aplikasi PAKDE SEMAR dan website e-sumpah yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sangat membantu untuk memproses sistem informasi dalam membuat berbagai produk pajak bumi dan bangunan salah satunya pembuatan objek pajak baru.

## 5.2 Keterbatasan

Selama penulis magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, penulis memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Rentang data penulis hanya terkait dengan prosedur sistem informasi pembuatan objek pajak baru.
2. Penulis tidak bisa menyaksikan secara langsung proses pembuatan objek pajak baru hingga terbitnya SPPT.
3. Penulis tidak membahas alur dari penetapan NJOP setelah terbitnya SPPT yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Hal ini karena keterbatasan data dan rentang pembahasan yang luas.
4. Penulis tidak mengamati langsung proses terbitnya SPPT setelah wajib pajak mendaftarkan dirinya dan memasukan dokumen-dokumen.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat berikan untuk dijadikan masukan bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu sebagai berikut

1. Memperbaiki sistem informasi pembuatan objek pajak baru dengan menambahkan komponen kontrol staff bagian pelayanan pembuatan produk pajak bumi dan bangunan dapat mengkontrol dan memeriksa sistem secara berkala apabila terjadi gangguan.
2. Menambah sumber daya manusia agar dapat mengecek dokumen wajib pajak di pos wilayah setempat, karena untuk mengetahui dokumen tersebut lengkap atau tidak hanya bisa dilakukan untuk kantor pusat kota saja, sehingga apabila sudah berjalan dengan optimal dan ditambahkan staff verifikator di pos wilayah pelayanan pajak bumi dan bangunan setempat akan muncul sebagai acuan kerja yang baik demi meningkatkan kinerja khususnya dalam melaksanakan pembuatan objek pajak bumi dan bangunan.
3. Diadakan kembali pelatihan untuk pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

agar dapat lebih mengoptimalkan kembali penggunaan Sistem Informasi Pembuatan Objek Pajak Baru dengan aplikasi PAKDE SEMAR dan website e-sumpah



## DAFTAR PUSTAKA

- anggraeni Yunaeti Elisabet, Irvani Rita. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Dwiyanto, Agus Dkk. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, W. H., & I. M. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 17-22.
- Indrayani, H. (2012). Penerapan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Efektivitas, Efisiensi Dan Produktivitas Perusahaan. 51.
- J, W. (2003). Teori Organisasi Dan Pengorganisasian. *Kencana Prenada Media Group*.
- Janry, S. H. (2012). Konsep Dasar Sistem Informasi. 12-13.
- Lubis, S. A. (2015). Urgensi Kebijakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 20.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Safira, D. M. (2019). Tujuan Audit Sistem Informasi. 3.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tata, S. (2012). *Analisis Sstem Informasi*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.